

## Pertarungan Makna Atas Pernyataan Cawe-Cawe Presiden Jokowi Mengenai Pemilu 2024 di Media Indonesia

Jumadal Simamora<sup>1</sup>, Udi Rusadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pelita Harapan (UPH), Jakarta

<sup>2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jakarta

[jumadal.simamora@uph.edu](mailto:jumadal.simamora@uph.edu)

### ABSTRACT

*The mass media has an important role as a means to reach a wide audience that can influence public opinion in society. Therefore, the media is a social institution that is contested to obtain and win power. Text is a form of ideological practice, language, writing and choice of words that are understood to carry ideological meanings that are used to win public support. In a meeting with the editors-in-chief of mass media and content creators, President Jokowi stated that he would participate in the 2024 elections to ensure that the elections take place safely and smoothly. President Jokowi's statement that he will chat in the 2024 Presidential Election has received pros and cons and has been interpreted differently by the public. The purpose of this study is to find out how the battle for meaning is being carried out by Media Indonesia regarding the statements of President Jokowi's cawe in the 2024 election in the headline news. This study uses a critical paradigm using a political economy media approach. The method used is Halliday's social discourse analysis method which is based on three concepts, namely, the field of discourse, the involvement of discourse and the mode of discourse. Based on the analysis carried out, in its reporting, Media Indonesia chose sources who were dominant against President Jokowi's cawe-cawe statements. Cawe-cawe is interpreted as the President's non-neutrality in the 2024 presidential election, a setback to democracy and as scaring the people.*

**Keywords:** Battle of Meaning, Cawe-cawe, 2024 Election, Media Indonesia.

### ABSTRAK

Media massa memiliki peran penting sebagai sarana untuk menjangkau khalayak luas yang dapat mempengaruhi opini publik di masyarakat. Oleh karena itu, media adalah salah satu institusi sosial yang diperebutkan untuk memperoleh dan memenangkan kekuasaan. Teks merupakan salah satu bentuk praktik ideologi, bahasa, tulisan dan pilihan kata yang dipahami membawa makna ideologi yang digunakan untuk memenangkan dukungan publik. Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa dan *content creator*, Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 untuk memastikan pemilu berlangsung dengan aman dan lancar. Pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe pada Pilpres 2024 mendapat pro dan kontra dan dimaknai secara berbeda oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertarungan makna yang dilakukan Media Indonesia terkait pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pemilu 2024 dalam berita *headline*. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik media. Metode yang digunakan adalah metode analisis wacana sosial Halliday yang didasarkan pada tiga konsep yaitu, medan wacana,

pelibat wacana dan mode wacana. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dalam pemberitaannya, Media Indonesia memilih narasumber yang dominan kontra terkait pernyataan cawe-cawe presiden Jokowi. Cawe-cawe dimaknai sebagai ketidaknetralan Presiden dalam pilpres 2024, kemunduran demokrasi dan sebagai menakut-nakuti rakyat.

**Kata Kunci:** Pertarungan Makna, Cawe-cawe, Pemilu 2024, Media Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Menjelang pemilihan umum serentak 2024, isu politik di tanah air semakin menghangat, terutama soal pengganti Presiden Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Hasil sejumlah survey menunjukkan 3 kandidat calon Presiden yang menempati urutan teratas dipilih oleh publik adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Tiga calon berpeluang besar akan maju dalam pemilihan presiden 2024. Meskipun masih dalam tahap membangun koalisi dengan partai Demokrat dan PKS agar dapat mengajukan capres dan cawapres, Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022 lalu sudah mendeklarasikan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres. Demikian juga Partai Gerindra yang dalam sejumlah pemberitaan media akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sudah menyampaikan dengan tegas mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Gabungan kursi Partai Gerindra dan PKB sudah cukup memenuhi persyaratan untuk mengajukan capres dan cawapres di pilpres 2024. Belakangan, pada 21 April 2023, gubernur aktif Jawa Tengah yang juga kader partai PDIP, Ganjar Pranowo, telah dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai calon presiden (detikNews, 2023).

Kebijakan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan menjadi capres dinilai mendahului Presiden Jokowi. Menurut sejumlah pengamat, Anies Baswedan dinilai menjadi antitesis Jokowi yang selama ini kerap mengkritik pemerintah. Oleh karena itu, keputusan Partai Nasdem mencalonkan Anies Baswedan membuat hubungan antara Presiden Jokowi dengan ketua umum Nasdem menjadi kurang harmonis.

Di lain pihak, kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan juga dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ditengarai sebagai bentuk dukungan Presiden Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyampaikan pernyataan terkait Prabowo dan Ganjar Pranowo dimaknai sebagai bentuk dukungan kepada kedua kandidat tersebut.

Salah satu contohnya, ketika Presiden Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Relawan Pro-Jokowi (Projo) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu (21/5/2022). Dalam pidatonya, Jokowi mengimbau para relawan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan calon presiden untuk kontestasi politik 2024 (Fitriana, 2022). Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan untuk fokus terlebih dahulu pada penyelesaian berbagai masalah nasional, terutama masalah ekonomi rakyat. "Yang berkaitan dengan politik, karena kita fokus selesaikan masalah itu, maka ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,

meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini (di arena Rakernas)," kata Jokowi. Pada saat itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menghadiri acara tersebut. Atas pernyataan Jokowi, tidak sedikit masyarakat menafsirkan bahwa pernyataan itu sebagai sinyal atau tanda dukungan presiden kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Pada kesempatan lain, saat Jokowi menghadiri ulang tahun ke 8 partai Perindo pada tanggal 7 Oktober 2022, dalam pidatonya ia menyampaikan pilpres 2024 menjadi jatah Prabowo setelah bercerita dirinya menang Pilpres dua kali. "Saya ini dua kali walikota di Solo menang, kemudian di tarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang, kemudian dua kali di Pemilu Presiden juga menang, kelihatannya setelah ini jatah Prabowo", ungkap Jokowi (Ramadhan, 2022). Pernyataan Presiden Jokowi tersebut dinilai sebagai bentuk sinyal dukungannya terhadap Prabowo menjadi calon presiden tahun 2024 (Safitri, 2023).

Moment lain kebersamaan Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terjadi pada 9 Maret 2023. Mereka tampil bersama saat panen raya di Desa Lajer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Meskipun dalam kunjungan kerja tersebut hadir sejumlah Menteri, namun Presiden Jokowi, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berfoto dalam satu *frame* yang menimbulkan multitafsir dan pendapat di masyarakat. Kedekatan itu dicurigai sebagai bentuk campur tangan presiden dalam Pemilu 2024 (Suhartono Nikolaus Harbowo, Kurnia Yunita Rahayu, 2023).



Gambar 1. Foto Presiden Joko Widodo saat meninjau panen raya padi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Sumber: Kompas.id (2023)

Dugaan adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam menentukan calon presiden semakin mengundang perhatian publik tatkala ia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional dan *content creator* di Istana pada Senin, 29 Mei 2023 lalu. Presiden Jokowi pada pertemuan itu menyampaikan bahwa ia akan cawe-cawe menjelang pemilihan presiden 2024. "Demi kepentingan bangsa

dan negara saya akan cawe-cawe”, katanya. (CNBC Indonesia 2023). Presiden menjelaskan bahwa makna cawe-cawe yang ia sampaikan adalah ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan dengan lancar.

Pengakuan Presiden Jokowi mengenai cawe-cawe menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menanggapi bahwa cawe-cawe Presiden merupakan hak dari Presiden dan ada yang memaknai bahwa cawe-cawe merupakan bentuk ketidaknetralan presiden dalam pemilu 2024. Agar pro kontra pernyataan Presiden Jokowi tidak semakin melebar di masyarakat, sehari setelah pernyataan itu disampaikan, pada tanggal 30 Mei 2023 pihak istana, melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin menjelaskan lima hal terkait pernyataan Presiden Jokowi (Nugraheni, 2023). Pertama, dalam konteks pemilu 2024, Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan dengan demokratis, adil dan jujur. Kedua, Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung dengan lancar dan aman tanpa polarisasi atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Ketiga, presiden mengharapkan pemimpin nasional ke depan dapat melanjutkan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Jokowi sebelumnya, seperti pembangunan IKN, transisi energi bersih dan hilirisasi. Keempat, bagi para peserta pemilu 2024, presiden berharap agar berkompetisi secara bebas dan *fair*. Oleh karena itu, harus dipastikan netralitas TNI, Polri dan ASN. Kelima, presiden menginginkan pemilih mendapatkan informasi yang berkualitas terkait informasi dan proses pemilu. Dengan demikian, pemerintah akan semakin kuat untuk mencegah *hoax*, *black campaign*, *berita* bohong, dampak negatif *artificial intelligence* melalui media sosial (Nugraheni, 2023).

Meskipun pihak istana sudah memberikan penjelasan maksud pernyataan Presiden Jokowi, namun isu cawe-cawe tetap menjadi materi berita utama atau *headline* di berbagai media massa. Isu cawe-cawe ditampilkan dengan berbagai sudut pandang kontruksi yang berbeda. Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa media memaknai pernyataan dari sisi positif dan negatif. Ada juga media memberitakan pengakuan cawe-cawe Jokowi sebagai hal yang tidak baik, terutama dalam pemberitaan grup media Indonesia.

Media Indonesia merupakan milik Surya Paloh yang juga menjadi ketua umum partai Nasdem. Pada pilpres 2024, Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Sehubungan dengan itu, penelitian bertujuan mengkaji bagaimana pertarungan makna yang dilakukan Media Indonesia terkait pengakuan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pilpres 2024. Bagaimana Media Indonesia mengemas pemberitaan pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pilpres 2024, menarik untuk di kaji lebih mendalam dalam perspektif ekonomi politik media.

## TINJAUAN LITERATUR

### Pertarungan Makna dan Kekuasaan Simbolis

Bagi banyak orang, seperti kemukakan Louw (2001) makna yang kita jalani dalam hidup ini sudah ada begitu saja, sama halnya seperti udara yang kita hirup. Makna diterima begitu saja, dan hanya sedikit yang merenungkan bagaimana makna itu dibangun. Namun, makna tidak ada begitu saja - makna diciptakan secara aktif ketika orang bertemu dan berpikir tentang dunia, dan kemudian mencoba menemukan cara untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan kepada orang lain. Makna juga dibuat ulang seiring dengan perubahan situasi.

Di dunia kontemporer, lanjut Louw (2001) makna sering kali dibuat di dalam institusi yang disebut media, di mana produksi makna telah diprofesionalkan. Pembuatan makna di dalam media seperti itu tentu saja terkait dengan serangkaian hubungan antara orang-orang yang telah berubah ke dalam perilaku dan praktik kerja yang dilembagakan. Hal ini melibatkan munculnya hubungan kekuasaan di antara orang-orang yang terlibat dalam pengaturan kelembagaan tersebut. Mengurai agenda, kepentingan, dan perjuangan di antara orang-orang tersebut membantu memberi wawasan tentang dunia makna yang kita tempati.

Untuk mengurai makna lingkungan makna dari perspektif kritis, ada dua pendekatan yang sangat berguna untuk menganalisis proses komunikatif, yaitu pendekatan kajian budaya dan pendekatan ekonomi politik. Pendekatan ekonomi menekankan perlunya menganalisis komunikasi secara kontekstual. Bagi para ahli ekonomi politik, makna harus dilihat sebagai sesuatu yang terikat erat dengan tempat (fisik dan temporal) di mana makna tersebut dibuat/digunakan. Pendekatan seperti ini menyanggah gagasan tentang makna atau 'kebenaran' yang berlaku secara universal. Oleh karena itu, para ahli ekonomi politik menganggap gagasan bahwa makna dapat dengan mudah ditransportasikan melintasi waktu dan tempat dan masih mempertahankan kode asli penulisnya sebagai sesuatu yang naif. Jadi, 'makna' bukanlah permainan bahasa yang mengambang bebas, seperti dalam kosmologi Derrida (1976) atau Laclau dan Mouffe (1985).

Ekonomi politik mengkaji 'makna' berkaitan dengan pemetaan hubungan antarmanusia dan bagaimana beberapa individu memperoleh kekuasaan lebih besar daripada yang lain melalui posisi mereka terhadap orang lain, posisi mereka terhadap sistem produksi dan sirkulasi media. Tersirat dalam hal ini adalah gagasan bahwa makna diperjuangkan ketika orang bekerja untuk meningkatkan posisi mereka. Dalam kerangka kerja seperti itu, pembuatan makna terlibat dalam proses perjuangan dan akuisisi kekuasaan yang berakar secara kontekstual. Memperoleh akses ke sarana produksi/sirkulasi komunikatif (dan bahkan kode-kode tertentu) merupakan turunan dari kekuasaan dan sarana untuk mengakumulasi kekuasaan. Masalah utamanya adalah bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, dalam konteks apa pun, akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap pembuatan makna dan sirkulasi makna karena mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap sistem pengkodean dan sirkulasi kode.

Oleh karena itu, menurut Louw (1995) seperti dikutip Ritonga (2014) penggunaan tanda merupakan pertarungan kekuasaan yang diartikulasikan sebagai konsep *struggle of meanings*. Pada dasarnya kekuasaan diperoleh dari: pertama, akses ke sumber daya; kedua, kedudukan/posisi sosial tertentu; ketiga, bahasa sebagai agen pengatur dan ruang yang secara umum berisi kekuasaan simbolis: struktur makna sebagai sebuah bentuk pembentuk. Pertarungan (*struggle*) terjadi pada tiga faktor itu (Louw, 2001). Menurut Louw, media merupakan sebuah bangunan pemikiran khalayak dalam kohubungan semiotik dianggap dalam produksi media. Makna dan hubungan kekuasaan muncul dari proses pertarungan. Proses ini bertujuan untuk membekukan makna dan struktur tertentu jika menguntungkan posisi mereka (Louw, 2005).

Dalam kekuasaan ada dua konsep penting yakni, pertama, manusia dipandang sebagai sesuatu yang pasif dan didominasi oleh praktek kekuasaan, kedua, manusia sebagai suatu yang aktif, dan kekuasaan dianggap antara manusia (Louw, 2005). Dalam penelitian ini, kedua andaian itu digunakan. Perebutan kekuasaan atau *struggle of power* terjadi dalam penandaan di media, dan kekuasaan melalui simbol itu dianggap sebagai output dari *struggle of meanings* (Louw, 2005).

## Kontrol Makna

Menurut Louw (2001) secara garis besar, ada dua perspektif tentang kontrol makna. Pertama, berpendapat bahwa makna yang kita konsumsi dapat dikendalikan (dan dimanipulasi). Di antara 'mazhab kontrol' adalah mereka yang menganut 'teori peluru' propaganda, kaum Marxis ortodoks yang percaya pada ideologi yang ditentukan oleh kelas, dan kaum strukturalis percaya bahwa kita mendiami 'penjara bahasa'. Perspektif kedua, berpendapat bahwa makna tidak dapat dikontrol karena penerima secara aktif 'membaca, menafsirkan, dan menerjemahkan makna untuk diri mereka sendiri. Pendekatan yang terakhir ini menekankan pada kreativitas manusia yang aktif dalam proses komunikasi sehingga secara inheren menantang gagasan tentang penerima yang mudah ditipu dan pasif yang terbuka untuk dimanipulasi oleh komunikator profesional.

Kedua kelompok perspektif di atas menurut Louw tidak harus saling terpisah. Sangat dimungkinkan membayangkan individu dan kelompok yang mencoba untuk mengontrol produksi makna dan distribusi makna dan berhasil dalam konteks tertentu, tetapi tidak berhasil dalam konteks lainnya. Hal yang sama juga memungkinkan untuk membayangkan berbagai tingkat pembaca/*decoding* aktif dalam konteks yang berbeda yang akan menantang komunikasi manipulatif. Pada akhirnya, bagi kebanyakan orang, mungkin akan ada dialektika yang terus bergeser antara menjadi rentan terhadap manipulasi/kontrol dan keterlibatan dalam penyandian ulang secara aktif. Dialektika yang bergeser ini terkait dengan variabel hubungan berbasis kontekstual, perubahan keanggotaan kelompok, dan perbedaan individu, yang semuanya menentukan kecenderungan seseorang untuk menjadi pembaca aktif (Louw, 2001).

Louw mengemukakan bahwa akan selalu ada beberapa individu atau kelompok yang mencoba mengendalikan makna. Adapun yang mendasari hal ini adalah persaingan atas sumber daya (materi, budaya, dan status). Konteks berbeda terkait dengan seberapa terbatasnya sumber daya, tetapi tidak ada konteks yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memuaskan semua orang, dan selama sumber daya tidak mencukupi untuk memuaskan semua orang, maka perjuangan akan terjadi di antara kelompok-kelompok dan individu-individu. Dari perspektif Gramscian dan Foucaultian, pertarungan atas makna merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini, karena aturan-aturan keterlibatan diatur dalam struktur makna.

Pendekatan lain terhadap kontrol makna mengeksplorasi bagaimana proses komunikasi dibatasi dengan cara tertentu. Ada dua pandangan yang luas tentang pembatasan tersebut: pandangan 'kondisi manusia' dan 'tindakan manusia'. Pertama melibatkan keyakinan bahwa pembatasan proses komunikasi adalah kondisi alamiah manusia. Ini termasuk aliran strukturalis Prancis, yang diprakarsai oleh Saussure, yang percaya bahwa manusia dilahirkan ke dalam struktur linguistik yang ada yang kemudian mengatur ('membatasi') pengalaman dan perilaku manusia. Bagi para pemikir kategori ini, tidak ada komunikasi yang 'tidak dibatasi' karena kita selalu menghuni 'rumah penjara bahasa' yang sudah ditahbiskan dan tidak ada jalan keluar. 'Penjara' bahasa ini tidak dibangun dengan sengaja atau secara sadar oleh siapa pun sehingga tidak dapat ditantang atau diubah.

## **Kepemilikan Media dan Kontrol Makna**

Menurut Mcquail (2011) hal fundamental yang mendasari pemahaman tentang struktur media adalah isu kepemilikan dan implementasi kekuasaan dalam kepemilikan tersebut. Keyakinan bahwa kepemilikan memainkan peran sentral dalam menentukan sifat media bukanlah sekadar pandangan teori Marxis, melainkan merupakan suatu kebenaran logis yang dijelaskan oleh Altschull (1984), yaitu bahwa "Isi media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya". Oleh karena itu, tidak mengherankan bila terdapat berbagai bentuk kepemilikan media dan cara-cara berbeda dalam menjalankan kekuasaan atas kepemilikan tersebut.

Lebih lanjut, McQuail (2011) memberikan proposisi mengenai kepemilikan dan kontrol media. Pertama, kebebasan pers mendukung hak pemilik untuk memutuskan konten. Kedua, bentuk kepemilikan tidak dapat menghindari dari pengaruh konten. Ketiga, keragaman kepemilikan dan kompetisi adalah perlawanan yang tangguh melawan penyalahgunaan kekuasaan kepemilikan. Keempat, umumnya terdapat "cek & balance" di dalam *system* untuk membatasi pengaruh dari pemilik yang ditinggalkan.

Menurut Compine (2000:17) dalam Ritonga (2014) potensi bahaya dari pemilik modal terletak pada konsentrasi kewenangan dan kekuatan sosial-politik yang dimilikinya. Aspek politik yang dimiliki media menjadi alat potensial bagi

seorang aktor pemilik media dalam melakukan konstruksi politiknya berupa isi media yang terwujud pada asas kepentingan politik pemilik media. Bila dilihat dari sudut pandang komunikasi politik, maka aspek budaya dari media yaitu kebahasaan, pemilik media mempunyai kemampuan melakukan pertarungan makna di ruang publik melalui kontrol terhadap isi media miliknya.

Louw (2005) secara khusus mengaitkan bahasa dan produksi media. Isi media merupakan sebuah *struggle of meaning* dengan pemilik memiliki kekuatan dalam memberikan kontrol terhadap produksi pemaknaan berita di media massa miliknya. Dalam dunia kontemporer, makna secara frekuentatif dibuat oleh institusi media massa, dimana produksi makna menjadi bersifat profesional (Louw, 2001: 1). Dengan begitu, pada dasarnya, kekuasaan di media massa berusaha membuat makna tertentu mengenai kepentingan mereka. Pemilik media sebagai elit kapitalis memiliki kesempatan itu sebagai suatu hak istimewa yang diciptakan dalam sumber daya tanda semiotik di media massa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari dokumentasi halaman pertama berita media Indonesia versi *e-paper* yang terkaitu cawe-cawe Presiden Jokowi di Media Indonesia. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, media massa, dan lain-lain.

Untuk menganalisis masing berita digunakan kerangka kerja semiotika sosial M.A.K. Halliday sebagai pisau analisis (Sudibyo, 2006). Halliday membangun suatu kerangka kerja yang memungkinkan untuk membedah interaksi antara teks dan situasi (konteks) yang didasarkan pada tiga konsep, yaitu: Pertama, medan wacana (*field of discourse*), merujuk pada tindakan sosial yang sedang terjadi atau dibicarakan, aktivitas di mana para pelaku terlibat di dalamnya, serta praktik-praktik yang terlihat dalam teks. Kedua, pelibat wacana (*tenor of discourse*), mengidentifikasi pihak-pihak-pembicara dan sasaran-yang terlibat dalam pembicaraan, serta kedudukan dan hubungan di antara mereka. Ketiga, mode wacana, merujuk pada pilihan bahasa masing-masing media, termasuk apakah gaya bahasa yang digunakan bersifat eksplanatif, deskriptif, persuasif, metaforis, hiperbolis, dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran peneliti, usai pertemuan Presiden Jokowi dengan pemimpin redaksi dan *content creator* pada 29 Mei 2023 di Istana Negara, Media Indonesia edisi cetak mengangkat isu cawe-cawe dalam berbagai rubrik seperti headline, editorial dan opini. Peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya fokus pada headline atau halaman pertama surat kabar Media Indonesia, dari periode 30



Mei 2023-7 Juni 2023. Terdapat 4 berita *headline* yang diangkat Media Indonesia *e-paper* terkait cawe-cawe Presiden Jokowi. Berikut dipaparkan temuan penelitian yang dianalisis menggunakan analisis 3 pisau analisis semiotika Halliday, pelibat wacana, medan wacana dan mode wacana.

## **Judul Berita: Pernyataan Jokowi Cawe-cawe dinilai Memalukan**

Hari, Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023

### **a. Pelibat Wacana**

Berita dengan judul “Pernyataan Jokowi Cawe-cawe dinilai Memalukan” didominasi sebagai besar narasumber yang kontra dengan pernyataan Jokowi, yaitu dan sekaligus menandakan tidak ada sikap kenegarawanan dalam sebagai pemimpin negara. Narasumber berikutnya adalah PLT. Sekjen Partai Nasdem, Herwawi Taslim. Media Indonesia juga dalam berita tersebut memasukkan pandangan dari Kepala Badan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Pada berita itu, ada juga Deputy Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretaris Presiden Bey Machmudin yang menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden mengenai cawe-cawe.

### **b. Medan Wacana**

Media Indonesia dalam *headline* yang berjudul “Pernyataan Jokowi Cawe-cawe dinilai Memalukan” hendak menonjolkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi mengenai Cawe-Cawe di pemilu 2024 sebagai bentuk ketidaknetralan pemimpin negara dalam pemilu Presiden. Media Indonesia mengutip peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur yang menilai pernyataan Jokowi mengenai cawe-cawe di Pilpres 2024 sebagai yang vulgar, memalukan. “Dia masih memegang kendali aparat negara. Kalau dia punya posisi seperti itu, Masyarakat berhak curiga bahwa itu akan digunakan untuk kepentingan keberpihakan Presiden. Ketidaknetralan itu pasti punya dampak dan itu dikhawatirkan kalau kepala pemerintahan sudah kasih pernyataan begitu. Rezim ini sudah vulgar dan memalukan levelnya. Jokowi bukan negarawan, pernyataan itu tidak elok,” tegas Friman.

### **c. Mode Wacana**

Pada *headline* edisi 30 Mei 2023, Media Indonesia menghadirkan gambaran yang tendensius mengenai pernyataan Presiden Jokowi. Dari judul, Media Indonesia, “Pernyataan Jokowi Cawe-cawe dinilai Memalukan. Dengan ukuran *font* yang lebih besar Media Indonesia menuliskan “Presiden memiliki kendali terhadap aparat negara yang dapat digerakkan untuk menentukan calon pemimpin selanjutnya secara tidak demokratis”. Media Indonesia juga menggunakan bahwa cawe-cawe Jokowi berdampak pada pemilu yang tidak jujur, tidak bermartabat. Media Indonesia juga mengkonstruksi Jokowi sebagai tidak memiliki sikap yang berubah-ubah karena sebelumnya Jokowi mengaku tidak cawe-cawe.

## **Judul Berita: Publik Khawatirkan Cawe-Cawe Presiden Jokowi**

Hari, Tanggal: Rabu, 31 Mei 2023

## a. Pelibat Wacana

Dalam berita Media Indonesia berjudul "Publik Khawatirkan Cawe-cawe Presiden Jokowi", menggunakan sumber berita bakal calon Presiden Presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Selain Anies Baswedan, dalam berita Media Indonesia menampilkan narasumber Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Pada bagian akhir berita itu, menampilkan narasumber ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuriyanto yang atau Bambang Pacul yang menyampaikan cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai hal yang wajar dan adab. Media Indonesia juga mengutip pernyataan Wakil Presiden ke 12- RI, Jusuf Kalla yang mengaku mendukung cawe-cawe pada pemilu 2024 jika cawe-cawe yang dimaksudkan Jokowi adalah memastikan pemilu 2024 berjalan dengan aman dan lancar.

## b. Medan Wacana

Dalam berita berjudul "Publik Khawatirkan Cawe-cawe Presiden Jokowi", didominasi oleh narasumber yang kontra terhadap pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi. Berita itu berintikan pernyataan-pernyataan dari narasumber yang mengkhawatirkan dampak dari pernyataan Presiden Jokowi mengenai cawe-cawe. Mengutip pandangan Anies Baswedan, Media Indonesia menuliskan bahwa ada kekhawatiran masyarakat termasuk bakal munculnya penjegalan dan kriminalisasi terhadap lawan politik dan kekuasaan. Kekhawatiran itu diungkapkan Anies Baswedan seperti dalam kutipan di bawah ini:

"Partai-partai mendapat perlakuan tidak *fair*, juga potensi terjadinya kecurangan. Semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," jelas Anies.

Ketidaknetralan Presiden Jokowi dipertegas dengan kutipan pernyataan Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

"Tindakan cawe-cawe akan meninggalkan legasi negatif Jokowi sebagai kepala negara yang seharusnya netral dan tidak berpihak", ujarnya.

## c. Mode Wacana

Media Indonesia cenderung menggunakan bahasa yang melebih-lebihkan pernyataan Presiden Jokowi mengenai cawe-cawe. Judul berita "Publik Khawatirkan Cawe-Cawe Presiden Jokowi", seolah-olah semua publik mengkhawatirkan pernyataan Presiden Jokowi. Faktanya, publik yang mengkhawatirkan itu adalah narasumber yang kontra dengan pernyataan Presiden Jokowi.

**Judul Berita: Cawe-cawe Simbol Penyusutan Demokrasi**

Tanggal Terbit: Sabtu, 3 Juni 2023

Pada edisi 3 Juni 2023. Media Indonesia memunculkan *headline* dengan judul Cawe-cawe Simbol Penyusutan Demokrasi. Laporan ini disertai dengan editorial media Indonesia dengan judul Dukacita Netralitas Kepala Negara.

## a. Pelibat Wacana

Berita di Media Indonesia dengan judul “Cawe-cawe Simbol Penyusutan Demokrasi didominasi oleh pandangan narasumber yang kontra dengan pernyataan Presiden mengenai Cawe-cawe, diantaranya Ketua Muhammadiyah bidang hukum dan HAM, Busyro Muqqodas. Selain itu, Media Indonesia juga menampilkan pendapat analis politik dan sekaligus CEO Vox Pop Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Berita tersebut di lengkapi dengan pendapat juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra.

Selain ketiga narasumber tersebut, Media Indonesia dalam sub judul *headline* “ada kekhawatiran” menampilkan pendapat kepala departemen Economomi Center for Strategic International Studies (CSIS), Fajar B. Hirawan dan pengamat komunikasi politik UGM, Nyarwi Ahmad.

## b. Medan Wacana

Dalam berita itu, Media Indonesia Indonesia menyoroiti bakal cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai symbol penyusutan demokrasi. Hal itu ditampilkan dengan mengutip pernyataan Ketua Muhammadiyah bidang hukum dan HAM, Busyro Muqqodas. “Pernyataan itu symbol penyusutan demokras, dan kamin menunjukkan kondisi Indonesia sedang karut-marut”. Dengan kata lain, pendapat itu mencerminkan kritik terhadap pernyataan Jokowi. Kritik berikutnya disampaikan oleh analis politik dan sekaligus CEO Vox Pop Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago yang mengemukakan bahwa cawe-cawe presiden Jokowi membuat citranya menjadi makelar. “Presiden cawe-cawe menurunkan wibawa citra menjadi politisi makelar. Sementara presiden negarawan naik kelas, bagaimana berpikir keras dan focus menjaga pemilu berjalan sukses, equal, dan bermartabat”, kata Pangi.

## c. Mode Wacana

Dalam headline Media Indonesia berjudul “Cawe-cawe Simbol Penyusutan Demokrasi” media Indonesia menyajikan data-data manuver Presiden Jokowi. Dalam data yang dipaparkan Media Indonesia menyebut 4 manuver Presiden Jokowi, antara lain: 1). Kode capres dari Jokowi; 2). Ikut hadir dalam deklarasi Ganjar capres; 3). Mengumpulkan ketua umum parpol koalisi di Istana dan 4). Mengendorse Prabowo dan Ganjar.

Adapun dampak negatif campur tangan Jokowi menurut dua pengamat sebagaimana dipaparkan Media Indonesia. Pertama dari The Institute for Development of Economic and Finance (Indef), ada empat dampak negatif dari dampak campur tangan Jokowi, yakni, 1). Jokowi menjadi aktor utama di pilpres, bukan para calon presiden. 2). Masalah etika politik, 3). Dalam demokrasi tidak ada

warisan kekuasaan, dan, 4). Keadilan (*fairness*) dirusak ketika Presiden terlibat langsung membangun koalisi.

## **Judul Berita : Jokowi Dinilai Menakuti Rakyat**

Hari, tanggal : Media Indonesia, Rabu 7 Juni 2023

### **a. Pelibat Wacana**

Media Indonesia pada edisi, Rabu 7 Juni 2023, memuat berita terkait cawe-cawe Presiden Jokowi berjudul “Jokowi Dinilai menakuti Rakyat”. Berita ini berisi penegasan Jokowi terkait cawe-cawe. Selain penegasan Presiden Jokowi, berita menampilkan pernyataan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Di bagian akhir berita, ditampilkan pendapat Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun.

### **b. Medan Wacana**

Dalam berita ini, Media Indonesia ingin menonjolkan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi merupakan sesuatu yang berbahaya dan menakut-nakuti rakyat. Berita ini terkait penegasan Presiden Jokowi dalam konferensi pers Pembukaan Rapat Kerja Nasional. Pada acara itu, Presiden menyampaikan bahwa cawe-cawe yang ia lakukan merupakan tanggung jawab moralnya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada tahun 2024, agar pilpres berjalan lancar tanpa riak-riak yang membahayakan negara. Atas penegasan itu, Media Indonesia mengutip pernyataan Ketua Bidang Kehormatan DPP PKS, Mardani Ali Sera yang mengatakan cawe-cawe tersebut sangat berbahaya dan menakuti rakyat. Pada bagian akhir berita, Media Indonesia memuat pernyataan kedua Bidang Kehormatan PDIP, yang menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut adalah hal yang wajar.

### **c. Mode Wacana**

Media Indonesia menghadirkan gambaran yang tendensius dengan menyebut cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai “berbahaya” dan “menakut-nakuti rakyat”. Media Indonesia mengutip pernyataan ketua bidang Kehormatan DPP PKS, Mardani Ali Sera, pernyataan itu dinilai berbahaya dan menakut-nakuti rakyat:

“Pernyataan pak Jokowi ini berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi penjaga pengawal utama proses pemilu.”

## **Pembahasan**

Berdasarkan analisis semiotika Halliday di atas, Media Indonesia mengkonstruksi pernyataan Jokowi yang akan cawe-cawe dalam pemilu serentak 2024 dimaknai berbeda oleh Media Indonesia. Meskipun presiden sudah menjelaskan bahwa makna pernyataannya akan cawe-cawe adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lancar tanpa riak-riak tetapi Media Indonesia memaknai sebagai bentuk ketidaknetralan presiden dalam pemilu. Dalam pandangan Louw (2001), telah terjadi pertarungan makna diantara elit. Media

Indonesia dalam pemberitaannya mengonstruksi pernyataan Presiden Jokowi sebagai untuk menakut-nakuti masyarakat, menunjukkan ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Konstruksi pemberitaan itu dilakukan dengan menampilkan wawancara yang didominasi narasumber yang pada umumnya kontra terhadap pernyataan Presiden Jokowi.

Menurut penulis, konstruksi Media Indonesia terkait pernyataan Presiden Jokowi tidak terlepas dari konteks dinamika peta politik dan arah dukungan partai politik pada pilpres 2024. Media Indonesia yang merupakan bagian dari Media Grup, dimiliki oleh pengusaha dan sekaligus politikus Surya Paloh. Surya Paloh juga merupakan ketua umum partai Nasional Demokrasi (NASDEM). Pada dua pilpres sebelumnya, yakni pilpres 2014 dan 2019, Partai Nasdem bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkoalisi mendukung Jokowi sebagai presiden. Menjelang pilpres 2019, media dibawah grup Media Indonesia seperti MetroTV, pada saat itu mengkonstruksi capres Jokowi dan Ma'ruf Amin, positif (Sapitri & Nurafifah, 2020). Namun pada pilpres 2024, meskipun masa jabatan Presiden belum selesai, Partai Nasdem telah mendeklarasikan mencalonkan Anies Baswedan sebagai capress 2024. dukungannya kepada Partai Demokrat, dan termasuk Media Indonesia, Surya Paloh.

Menjelang pilpres 2019, dimana MetroTV pada saat itu mendukung capres Jokowi dan Maruf Amin, pemberitaan MetroTV cenderung mengkonstruksi Jokowi dan Mar'uf Amin positif. Oleh karena itu, arah dukungan Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh ikut menentukan pemberitaan Media Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Altschull (1984), yaitu bahwa "Isi media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya", tercermin dalam pemberitaan Media Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh McNair dalam (Sudiby, 2006), untuk mengetahui isi media ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan politik ekonomi (*the political economy approach*), pendekatan organisasi (*organization approach*) dan pendekatan kulturalis (*culturalist approach*). Pendekatan ekonomi politik berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media sebagai faktor yang lebih berpengaruh menentukan isi media.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis teks yang ditampilkan Media Indonesia, milik Surya Paloh terkait pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe di pemilu 2024, maka dapat disimpulkan:

Media Indonesia mengkonstruksi teks dengan didominasi narasumber atau pelibat wacana yang pada umumnya kontra dengan makna cawe-cawe yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi, yaitu untuk memastikan pemilu serentak 2024

berlangsung lancar dan aman. Media Indonesia mengonstruksi makna cawe-cawe Jokowi sebagai sikap tidak netral dalam pemilu 2024 dan menakuti rakyat. Ketidaknetralan Jokowi berimbas pada kemerosotan demokrasi di Indonesia.

Melalui mode wacana yang ditampilkan berita media Indonesia, bahwa Langkah cawe-cawe Presiden Jokowi sebagai kemunduran demokrasi, merupakan *struggle of meaning* Media Indonesia yang pada dasarnya adalah dominasi terhadap sumber daya atau *symbolic capital*. Arah dukungan pemilik Media Indonesia yang sekaligus ketua umum Partai Nasdem yang mengusung calon berbeda pada pilpres 2023 turut mempengaruhi pemaknaan teks yang ditampilkan media Indonesia melalui symbol-simbol dalam bentuk kekuasaan semiotik. berkaitan dengan kepemilikan Media Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA.

detikNews, T. (2023). Megawati Umumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP. In *detikjatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6684480/megawati-umumkan-ganjar-pranowo-sebagai-capres-pdip>

Fitriana, I. (2022). Jokowi buka rakernas projo: soal politik ojo kesusu meski yang didukung mungkin di sini. Halaman all. In *KOMPAS.com*. <https://regional.kompas.com/read/2022/05/21/161736378/jokowi-buka-rakernas-projo-soal-politik-ojo-kesusu-meski-yang-didukung>

Louw, P. E. (2001). *The Media and Cultural Production*. SAGE Publications.

Louw, P. E. (2005). The Media and Political Process. In *SAGE Publications*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.7228/manchester/9780719072246.003.0005>

Louw P. Eric. (2001). The Struggle for Power and the Struggle for Meaning. *The Media and Cultural Production*, 1–36. <https://doi.org/10.4135/9781446219744.n1>

Nugraheni, D. E. (2023). Penjelasan istana Soal Cawe-Cawe yang Dimaksud Presiden Jokowi. In *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/07482321/penjelasan-istana-soal-cawe-cawe-yang-dimaksud-presiden-jokowi>

Ritonga, R. (2014). *PERTARUNGAN MAKNA PADA KONVENSIFOR A PRESIDENTIAL CANDIDATE AT THE DEMOCRATIC PARTY CONVENTION IN THE*. 30(2), 201–220.

Safitri, E. (2023). Istana Jelaskan Maksud Jokowi Akan Cawe-Cawe Demi Bangsa dan Negara. In *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6745878/istana-jelaskan-maksud-jokowi-akan-cawe-cawe-demi-bangsa-dan-negara>

Sapitri, H., & Nurafifah, N. L. (2020). Media Televisi Swasta dan Politik dalam

# Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting

Volume 4 Nomor 1 (2024) 489-502 E-ISSN 2798-6683 P-ISSN 2798-690X

DOI: 10.47467/dawatuna.v4i1.4933

Pemilihan Presiden 2019 Ditinjau dari Perspektif Agenda Setting. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), 113–122.

Sudibyo, A. (2006). *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (Ke dua). LKiS: Yogyakarta.

Suhartono Nikolaus Harbowo, Kurnia Yunita Rahayu, N. S. (2023). Saat Presiden Jokowi, Prabowo, dan Ganjar Tampil Bersama. In *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/10/saat-presiden-jokowi-prabowo-dan-ganjar-tampil-bersama>